

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

II. 1. KONDISI SAAT INI

Pembangunan yang telah diselenggarakan di Kabupaten Wonogiri selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana prasarana, politik dan tata pemerintahan, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparat, wilayah tata ruang dan pertanahan, dan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2.1.1.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Wonogiri pada tahun 1995 berjumlah 1.060.829 jiwa dan meningkat dari tahun ke tahun sehingga tahun 2000 menjadi sebanyak 1.089.797 jiwa dan pada tahun 2005 diperkirakan meningkat lagi menjadi sebanyak 1.121.454 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2005 itu terdiri dari laki-laki 559.794 jiwa (49,92 %) dan perempuan 561.660 jiwa (50,08 %). Jumlah Rumah Tangga/Kepala Keluarga sebanyak 255.955 RT. Dengan rata-rata per KK sebanyak 4,38 jiwa.

Pertumbuhan penduduk pada tahun 1995 mencapai 0,681 % dan pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonogiri meningkat mencapai 0,736 %, sedangkan pada tahun 2005 pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi sebesar 0,387 %. Pertumbuhan penduduk tahun 2005 ini hampir sama dengan pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,384 %.

Sedangkan tingkat kepadatan penduduk per kilometer pada tahun 1995 mencapai 582 jiwa/ km² dan ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar 610 jiwa/ km² pada tahun 2010. Kepadatan penduduk tahun 2005 juga mengalami peningkatan sampai menjadi sebesar 615 jiwa/ km².

Kualitas sumber daya manusia masih rendah, terbukti dari sebagian besar penduduk usia diatas 5 tahun berdasarkan data tahun

1997 yaitu sebesar 39,4 % hanya tamat Sekolah Dasar, disamping ada yang tidak tamat SD sebesar 12,4 persen; belum tamat SD sebesar 15,7 persen dan tidak sekolah sebesar 11,0 persen. Pada tahun 2005 penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD itu masih mendominasi yaitu mencapai 33,84 %.

2.1.1.2. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Kualitas penduduk yang relatif rendah dari aspek pendidikan mengakibatkan penduduk angkatan kerja tidak mempunyai daya saing yang tinggi dan mengakibatkan pengangguran terbuka cenderung meningkat. Pada tahun 1996, jumlah pengangguran berjumlah 7.181 orang atau mencapai 0,67 % dari total penduduk. Pada tahun 1999 jumlah pengangguran meningkat menjadi sebanyak 15.197 orang atau mencapai 1,38 % dari total penduduk saat itu. Jumlah pengangguran itu meningkat lagi pada tahun 2005 menjadi sebanyak 23.645 orang atau mencapai 2,10 % dari total jumlah penduduk.

Sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi lapangan kerja utama terbatas daya tampungnya, sehingga sebagian angkatan kerja yang ada bekerja pada Sektor informal di kota-kota besar lain di Indonesia sebagai kaum “Boro”. Tercatat jumlah penduduk boro sebanyak 113.093 orang diantaranya 57.878 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 55.215 jiwa perempuan.

2.1.1.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain *pertama* kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat, yang ditunjukkan pada tahun 2005 dengan Angka Partisipasi Murni atau APM rata-rata untuk SD/MI sebesar 93,00 %, Angka Partisipasi Murni atau APM rata-rata untuk SMP/MTs sebesar 70,01 % dan Angka Partisipasi Murni atau APM untuk SMA/SMK/MA hanya sebesar 53,25 %.

Faktor *Kedua* adalah kurangnya pemerataan pendidikan hal ini ditunjukkan pada tahun 2005 dengan Angka Partisipasi Kasar atau APK rata-rata untuk SD/MI sebesar 96,18 %, Angka Partisipasi Kasar atau APK rata-rata untuk SMP/MTs sebesar 84,47 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/SMK/MA hanya sebesar 62,53 %. Sementara itu jumlah penduduk dewasa yang buta huruf tahun 2005 relatif masih

banyak jumlahnya, yaitu sebesar 33.018 orang atau 5,32 % dari sebanyak 619.839 orang penduduk usia diatas 10 tahun.

Faktor *Ketiga* kurangnya kemampuan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan beaya yang terjangkau oleh masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, alat peraga, buku perpustakaan, laboratorium, tenaga guru dan lain-lain yang dapat mencukupi kebutuhan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Data tahun 2005 menunjukkan gedung sekolah dengan lokal berkondisi baik 40 % untuk pendidikan TK; 60 % untuk SD/MI; 1.474 lokal untuk SMP/MTs dan 702 lokal untuk SMA/SMK/MA. Rata – rata lama sekolah untuk Sekolah Dasar selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA selama 3 tahun.

Pembangunan pendidikan di kabupaten Wonogiri selain memerhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan juga memerhatikan sasaran-sasaran komitmen internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran *Millenium Development Goals (MDG's)* dan Kesepakatan Dakkar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS). Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten wonogiri selain dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, salah satunya dapat diukur melalui jumlah anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. dengan Angka Partisipasi Kasar atau APK rata-rata untuk SD/MI sebesar 96,18 %, Angka Partisipasi Kasar atau APK rata-rata untuk SMP/MTs sebesar 84,47 % dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/SMK/MA hanya sebesar 62,53 %.

Pemerataan dan akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri terjadi pada setiap jenjang tingkatan pendidikan, hal ini terlihat Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahun. Peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan di Kabupaten Wonogiri terjadi pada SDM tenaga pengajar, prosentase tingkat kelulusan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan merupakan wahana menciptakan warga negara yang berkualitas, sehingga dalam pelaksanaannya pendidikan di Kabupaten Wonogiri selalu ditekankan pada akuntabilitas, tata kelola dan pencitraan publik. Rasio sekolah guru dan murid adalah Pendidikan Anak Usia Dini 1: 20, Sekolah Dasar 1:43, Sekolah Menengah Pertama 1:31 dan Sekolah Menengah Atas 1:3.

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Mulai tahun 2009 Urusan Perpustakaan dilaksanakan secara tersendiri dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 127.113.160 untuk melaksanakan 2 Program dan 7 kegiatan, sementara di tahun 2010 anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,- untuk melaksanakan 2 Program dan 5 kegiatan.

Sampai dengan tahun 2009 koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah sebanyak 15.323 exemplar, sementara jumlah pengunjung perpustakaan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 17.664 orang.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan adalah belum tepenuhinya standart pelayanan perpustakaan yaitu standart koleksi judul buku sebesar 15.500 buku, rendahnya minat baca masyarakat. Adapun solusi yang dilaksanakan adalah penambahan koleksi buku, meningkatkan kegiatan perpustakaan keliling ke daerah maupun sekolah dan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca.

2.1.1.4. Pemuda dan Olahraga

Jumlah organisasi pemuda yang terdaftar 19 organisasi namun keberadaan lembaga itu dalam kegiatan pembangunan daerah belum diberdayakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam hal keolahragaan khususnya dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, dihadapkan pada kendala kurangnya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan yang mampu mendukung peningkatan prestasi. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga ditandai diantaranya dengan tampilnya potensi pemuda Wonogiri dalam berbagai event keolahragaan. Meskipun jumlah yang diraih tidak banyak, namun setiap tahun ada beberapa pemuda Wonogiri yang mendapatkan prestasi dalam berbagai lomba kreativitas pemuda. Pada tahun 2005 terdapat tiga prestasi yang diraih.

Dari sisi keolahragaan, jumlah atlet yang berprestasi juga menunjukkan peningkatan, dari 40 atlet pada tahun 2005. Selain itu keberhasilan Kabupaten Wonogiri meraih penghargaan dalam bidang keolahragaan juga sangat ditunjang oleh ketersediaan pelatih olah raga yang berkualitas. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan semakin

meningkatnya jumlah pelatih olah raga dari berbagai cabang, dari 10 orang pada tahun 2005 orang.

2.1.1.5. Kesehatan

Secara umum derajat kesehatan penduduk Wonogiri cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup dari 66 tahun pada tahun 2000 menjadi 68 tahun pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2007 Usia Harapan Hidup penduduk wonogiri rata-rata 71 tahun, walaupun dalam beberapa aspek kesehatan masih ditemukan beberapa permasalahan. Hal ini ditunjukkan data tahun 2005 dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu 93,03 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 14,57 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kurang gizi pada balita 4,78 %. Ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum memadai. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan rasio (perbandingan) sarana dan prasarana kesehatan terhadap penduduk.

Berdasarkan data tahun 2005 jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri sejumlah 1.121.454 jiwa dengan 34 Puskesmas, 62 dokter (medis) dan 445 tenaga para medis (perawat dan bidan), sehingga rata-rata setiap 1 Puskesmas melayani 32.984 penduduk, setiap 1 Dokter melayani 18.088 penduduk, dan 1 tenaga para medis melayani 2.520 penduduk. Permasalahan tersebut ditambah dengan adanya sebagian dokter dan tenaga medis lainnya adalah Pegawai Tidak Tetap atau PTT yang segera akan berakhir masa kontraknya.

Di sisi lain bahwa kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masih perlu ditingkatkan, terbukti masih adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 12 kali pada tahun 2005, serta meningkatnya kecenderungan penyakit akibat gizi berlebih dan degeneratif. Selanjutnya ditinjau dari kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan khususnya dalam optimalisasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan dalam hal penyediaan pelayanan yang memadai, profesional dan terjangkau oleh masyarakat.

2.1.1.6. Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Wonogiri masih menghadapi relatif banyak permasalahan terkait dengan masih rendahnya kesejahteraan sosial. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan masih banyaknya penduduk yang menyandang masalah sosial. Berdasarkan data tahun 2005 terdapat anak terlantar 5.574 anak, lanjut usia terlantar 7.066 orang, wanita rawan sosial ekonomi 7.477 orang dan anak nakal 71 orang. Hal tersebut disamping karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya yang termasuk dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terbatasnya akses Pemerintah dalam menangani masalah sosial dan masih kurangnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

2.1.1.7. Kemiskinan

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 masih 24,40 % atau sekitar 272.795 jiwa. Sedangkan berdasarkan perhitungan per KK yang dilakukan oleh Kabupaten Wonogiri dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2002, berhasil menurunkan KK Miskin dan Miskin Sekali dari 144.564 KK pada tahun 2002 menjadi 129.830 KK pada tahun 2004. Pada tahun 2005 diperkirakan KK Miskin dan Miskin sekali masih sebanyak 126.290 KK.

2.1.1.8. Kebudayaan

Perkembangan kebudayaan secara nasional menghadapi tantangan berat arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga keberadaan dan ketahanan budaya nasional kita dibenturkan pada budaya asing yang cenderung memiliki nilai dan norma berbeda bahkan bertentangan dengan nilai dan norma budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kabupaten Wonogiri sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai dan norma budaya bangsa juga ikut terkena dampak masuknya budaya asing itu. Dengan semakin deras arus informasi pada era globalisasi, ketahanan budaya daerah cenderung menurun karena kurangnya pelestarian seni budaya di masyarakat. Hal ini antara lain dapat dilihat meskipun Wonogiri memiliki potensi seni dan budaya yang cukup besar, ditandai dengan banyaknya sanggar atau organisasi kesenian yang mencapai 395 buah serta besarnya jumlah seniman yaitu seni musik,

seni drama, seni tari dan seni rupa, namun tingkat pelestarian dan pengembangan budaya asli bangsa itu masih relatif terbatas.

2.1.1.9. Agama

Berdasarkan data tahun 2005 sebagian besar penduduk Wonogiri yaitu 97,04 % memeluk agama Islam, sedangkan lainnya yaitu 0,97 % memeluk agama Kristen; 1,49 % memeluk agama Katholik; 0,49 % beragama Budha dan 0,01 % beragama Hindu. Jumlah bangunan sarana ibadah tahun 2005 seluruhnya sebanyak 3.393 buah, dengan rasio perbandingan tempat ibadah dengan jumlah pemeluknya berturut-turut untuk agama Islam 1:336, Kristen 1:126, Katholik 1:387, Budha 1:133 dan Hindu adalah 1:51. Ditinjau dari segi kuantitas keberadaan sarana ibadah untuk masing-masing pemeluk agama dirasakan masih belum merata dan memadai, sedang ditinjau dari segi kualitas belum seluruh umat beragama mengamalkan ajaran agama sebagaimana mestinya. Pengamalan ajaran agama yang kurang itu dapat berdampak pada akhlak dan perilaku manusia yang kurang baik serta relatif rendahnya tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah umat manusia.

2.1.1.10. Perempuan dan Anak

Ada permasalahan mendasar dalam pembangunan perempuan dan anak yaitu rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan. Di bidang kesehatan terlihat bahwa pemberdayaan perempuan dalam hal keluarga sehat , gizi dan reproduksi masih rendah. Terbukti dari tahun 2005 dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 93,03 per 100.000 kelahiran hidup; ibu hamil KEK sebesar 23,03 %; balita kurang gizi sebesar 4,78 %; Rumah sehat sebesar 47 % dan Rumah Tangga ber-PHBS sebesar 43 %. Dalam hal pendidikan terlihat bahwa akses perempuan terhadap pendidikan sangat terbatas, dengan salah satu penyebab sekolah lanjutan tidak berada di setiap desa sebagaimana sekolah dasar. Sehingga angka buta huruf perempuan lebih banyak dari laki-laki. Data tahun 2005 menunjukkan angka buta huruf perempuan sebanyak 52,09 % sedangkan laki-laki hanya sebanyak 47,91 % dari seluruh penduduk buta aksara.

Masih tingginya beban kerja perempuan di ruang domestik sehingga membatasi perempuan untuk turut serta di ruang publik. Hal ini mengurangi akses perempuan dalam pemberdayaan pembangunan ekonomi. Dari jumlah PNS di Kabupaten Wonogiri yaitu 12.677 orang maka terlihat jumlah PNS perempuan hanya 33,4 % yaitu 4.256 orang sedangkan PNS laki-laki yaitu 8.421 orang atau 66,4 %. Senada dengan itu, di ruang politik pun perempuan termasuk minim perannya. Dari 45 orang anggota DPRD, hanya 3 orang perempuan yang duduk di kursi dewan.

Demikian juga kalau dilihat dari keanggotaan dalam BPD maka jumlah anggota BPD perempuan sebanyak 265 orang sedangkan laki-laki sebanyak 2.787 orang. Berarti keterlibatan perempuan berkiprah di BPD hanya 10 % dibanding laki-laki. Permasalahan lain yang cukup serius adalah adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh anggota keluarganya atau orang lain. Data di Pengadilan Negeri Wonogiri tercatat ada kejahatan seksual terhadap perempuan sebanyak 5 kasus pada tahun 2001 dan 2 kasus pada tahun 2002. Namun demikian bila dilihat yang sesungguhnya fenomena yang terjadi di masyarakat maka akan ditemukan data yang jumlahnya dapat berpuluh kali lipat.

2.1.2. Ekonomi

2.1.2.1. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Wonogiri tidak dapat terlepas dari perkembangan perekonomian nasional maupun regional Jawa Tengah serta perekonomian wilayah Subosuka Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten). Perekonomian Kabupaten/ Kota di wilayah Subosuka Wonosraten itu selama kurun waktu tahun 2002 – 2005 ada kecenderungan tumbuh dengan angka yang fluktuatif.

Pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 1998 – 2002 menunjukkan angka pertumbuhan yang cenderung meningkat sebagai bentuk masa pemulihan (recovery) dampak krisis multidimensi. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi daerah negative karena krisis yang terjadi pertengahan tahun 2007, yaitu mencapai - 4,67 persen. Selama tahun 1999 – 2002 pertumbuhan ekonomi mulai bangkit walaupun belum mampu menembus angka 4 persen.

Pada tahun 2002 perekonomian Kabupaten Wonogiri tumbuh sebesar 3,86 persen dan tumbuh dengan angka lebih kecil pada tahun 2003 yaitu sebesar 3,17 persen. Namun pada tahun 2004 perekonomian Kabupaten Wonogiri itu mulai meningkat lagi dengan pertumbuhan sebesar 4,11 persen dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 tumbuh dengan angka lebih besar yaitu sebesar 4,14 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebelum otonomi daerah ada kecenderungan lebih tinggi dibandingkan pada kurun setelah ada kebijakan otonomi daerah.

Sektor yang mempunyai peran utama dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian. Pada tahun 1998 kontribusi sector pertanian mencapai 59,21 persen mendominasi sector-sector PDRB yang lain. Pada tahun 2000 kontribusi sector Pertanian ini sedikit menurun menjadi sebesar 58,51 persen. Selama kurun waktu 2000 – 2005 sumbangan rata-rata sector Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama 6 (enam) tahun terakhir (2000-2005) sebesar 50,74 %.

Sektor lain yang juga berperan terhadap perekonomian Wonogiri walaupun masih relative kecil pada tahun 1998 dan 2000 adalah sektor perdagangan Pengangkutan dan Komunikasi masing-masing sebesar 9,62 persen dan 9,23 persen. Kemudian sector Jasa-jasa dimana pada tahun 1998 kontribusinya sebesar 9,39 persen dan pada tahun 2000 sebesar 10,09 persen. Kontribusi sector Perdagangan, Hotel dan Restoran pada saat itu masih terbatas mencapai 8,72 persen (1998) dan 8,71 persen (2000). Pada tahun 2005, sector Perdagangan, Hotel dan Restoran meningkat kontribusinya mencapai sebesar 13,49 %, Sektor jasa-jasa memiliki kontribusi sebesar 11,78 %, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,25 %

2.1.2.2. Industri

Jumlah usaha industri di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2005 sebanyak 17.320 buah, dengan sebagian besar industri adalah industri kecil atau rumah tangga yaitu 99,92 %, industri sedang 0,06 % dan industri besar 0,02 %. Hal ini menyebabkan sektor Industri belum mampu menjadi penggerak perekonomian daerah antara lain karena lemahnya ketrampilan pelaku industri mikro kecil dan menengah dalam peningkatan daya saing dan terbukti dari rata-rata sumbangan terhadap PDRB selama tahun 2000 – 2005 baru mencapai 4,46 %.

Rata-rata kenaikan nilai produksi dan pertumbuhan jumlah industri masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha industri di Wonogiri masih kurang.

2.1.2.3. Koperasi dan UMKM

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Wonogiri secara kuantitatif mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun demikian peranannya belum dapat optimal dalam pengembangan ekonomi daerah sehingga masih perlu diberdayakan. Berdasarkan data tahun 2000 - 2005 jumlah koperasi di Kabupaten Wonogiri selalu meningkat yaitu dari 630 buah koperasi pada tahun 2000 menjadi 812 koperasi pada tahun 2005 dengan jumlah modal usaha sebesar Rp 138.649,57 juta dan jumlah anggota sebanyak 170.604 orang. Dari jumlah koperasi tersebut yang berkembang baik dengan klasifikasi aktif sampai dengan tahun 2005 sejumlah 485 koperasi. Di samping itu mulai tahun 2002 telah terbentuk Koperasi RT sejumlah 6.887 buah dan berkembang menjadi 6.897 buah pada tahun 2005. Permasalahan utama perkoperasian adalah lemahnya kelembagaan, manajemen, permodalan dan belum adanya jaringan (*networking*) yang luas dan kuat.

Sedangkan jumlah UMKM yang berkembang selama 2 (dua) tahun terakhir cenderung meningkat, dari tahun 2004 terdapat 17.505 UKM menjadi 17.539 UKM pada tahun 2005. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja dari 105.329 orang pada tahun 2004 menjadi 105.492 orang pada tahun 2005.

2.1.2.4. Investasi

Pembangunan bidang penanaman modal masih terkendala dengan kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana sehingga ada kecenderungan Kabupaten Wonogiri belum menjadi daya tarik bagi para investor . Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan nilai investasi baru pada tahun 2001 sebesar Rp. 17,15 milyar menjadi hanya Rp. 23,5 milyar pada tahun 2004. Berbagai upaya untuk mengembangkan penanaman modal telah dilakukan, antara lain melalui kegiatan promosi penanaman modal dan telah berhasil meningkatkan jumlah investasi menjadi 19 investor pada tahun 2004. Sedangkan tahun 2005 belum ada tambahan investor. Namun demikian dengan belum jelasnya regulasi dan jaminan kebijakan investasi di daerah, terutama dalam

pelayanan perijinan dan tarif maka menyebabkan belum dapat menarik investasi yang lebih besar.

2.1.2.5. Pertanian

Pembangunan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian perkebunan, peternakan dan kehutanan. Sektor pertanian masih merupakan sektor utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wonogiri dengan kontribusi sebesar **43,98 %**. Selama kurun 4 tahun terakhir sektor pertanian merupakan sektor andalan.

Data luas areal dan produksi pertanian dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi , namun demikian produksi semua komoditas tanaman pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dilihat dari **produksi tanaman pangan unggulan**, produksi padi cenderung fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh musim, dimana produksi dari tahun 2005 yaitu **307.429** ton.

Namun selama kurun waktu tersebut kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat bahwa pada tahun 2000 kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB sebesar 46,12 % dan berkembang menurun menjadi 41,20% pada tahun 2005. Dilihat dari produktifitas tanaman pangan, penurunan terjadi mulai tahun 2001 dikarenakan pengaruh musim kemarau yang cukup panjang dan pada tahun 2003 kekeringan melanda areal persawahan seluas 9.810 ha untuk padi, 1.040 ha untuk jagung, 3.722 ha untuk kedelai dan 11.877 ha untuk kacang tanah. Akibatnya produktivitas komoditi tanaman pangan unggulan sampai dengan tahun 2005 belum optimal, antara lain padi 59,85 kw per hektar, jagung 55,90 kw per hektar, kedelai 15,03 kw per hektar, kacang tanah 13,30 kw per hektar dan ketela pohon atau ubi kayu 178,92 kw per hektar, demikian halnya untuk produktifitas buah-buahan dan sayuran.

Di samping masalah yang berkaitan dengan pengaruh alam, pertanian tanaman pangan belum diberdayakan secara optimal, yang disebabkan oleh : *pertama* masih rendahnya kemampuan petani dalam menggunakan benih unggul bermutu/ bersertifikasi, *Kedua* serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) masih sering terjadi, dimana pada tahun 2005 melanda areal seluas 1.319 ha dan *ketiga* lahan persawahan masih banyak tergantung pada irigasi sederhana seluas

8.758 ha (27,88 %) dan tadah hujan seluas 8.140 ha (25,91 %) daripada irigasi teknis seluas 7.454 ha (23,72 %) maupun irigasi $\frac{1}{2}$ teknis seluas 4.459 ha (14,19 %).

Sumbangan rata-rata terhadap PDRB dari sub sektor perkebunan selama tahun 2000 - 2005 sebesar 3,99 %. Sehingga tampak bahwa usaha perkebunan belum diberdayakan secara optimal. Hal ini antara lain dapat dilihat pada tahun 2005 dari rata-rata produksi komoditi perkebunan yang masih rendah dan terbatas pada jenis komoditi tertentu, jambu mete dengan rata-rata produksi sebesar 944 kg per hektar dan cengkeh 336 kg per hektar. Komoditi potensial seperti durian, empon-empon, melinjo, lada, panili serta komoditi lainnya juga belum dikembangkan secara optimal. Untuk beberapa komoditi perlu diadakan peremajaan tanaman (ratoon). Masalah lain yang muncul di sektor Perkebunan adalah produktivitas, kualitas, manajemen usaha dan pengembangan jaringan pasar produk perkebunan belum optimal. Berkaitan dengan serangan hama perkebunan terjadi siklus hidup hama selama beberapa kurun waktu menurun dan pada waktu tertentu akan terjadi ekplosi (ledakan). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi penurunan, maka yang perlu diwaspadai pada 5 (lima) tahun mendatang diprediksikan luas serangan hama akan meningkat.

Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya juga belum diberdayakan secara optimal sehingga sumbangan rata-rata terhadap PDRB selama 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2000 - 2005 baru sebesar 2,41 %. Belum berkembangnya peternakan dapat dilihat dari data tahun 2005 menunjukkan jumlah produksi hasil daging ternak seperti kambing hanya 987.200 kg per tahun, sapi 5.196 ton per tahun dan domba 307.525 kg per tahun. Di sisi lain populasi ternak sapi, kambing dan domba selalu meningkat serta semakin meluas penyebarannya tetapi sebagian besar masih dibudidayakan secara sederhana, sehingga petani belum bisa menikmati nilai ekonomis secara optimal. Hal ini terjadi pula pada usaha peternakan unggas yang rata-rata juga masih berskala rumah tangga dengan produksi rendah. Permasalahan lainnya adalah sumberdaya petugas dan petani masih rendah, penyakit ternak serta dukungan permodalan dari lembaga perbankan yang masih kurang.

Wonogiri juga memiliki areal hutan negara seluas 14.810 hektar, sedangkan hutan rakyat seluas 27.433 hektar. Jenis dan jumlah produksi hasil hutan produksi yang dimiliki Perum Perhutani pada tahun 2005 berupa kayu pertukangan yaitu 4.777,87 M³, kayu bakar

131 SM, getah pinus 1.216.147 kg, daun kayu putih 22.730 kg dan minyak kayu putih 203,126 liter. Ditinjau dari luas areal, produktifitas hasil hutan tersebut masih relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya budidaya hutan, disamping masih seringnya terjadi kasus perusakan hutan dengan adanya penebangan liar dan illegal-logging. Sehingga perlu adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dan kelompok tani pelestari hutan, yang sampai dengan tahun 2005 berjumlah 58 kelompok, serta penegakan hukum atas pelaku perusakan hutan.

2.1.2.6. Kelautan dan Perikanan

Usaha perikanan masih terbuka luas untuk dikembangkan, hal ini didukung dari ketersediaan sumber daya perairan di Kabupaten Wonogiri. Namun bila dilihat dari sumbangan rata-rata terhadap PDRB selama tahun 2000 - 2005 baru sebesar 0,30 %. Belum berkembang dan meratanya usaha perikanan, dibuktikan dengan produksi dari budidaya pada tahun 2004 sebesar 1.037.329 kg dan pada tahun 2005 sebesar 1.040.796 kg sedangkan dari penangkapan pada tahun 2004 sebesar 1.045.893 kg dan pada tahun 2005 hanya sebesar 947.349 kg, dimana sebagian besar (99,4 %) berasal dari budidaya dan penangkapan di Waduk Gajah Mungkur. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya melalui perkolaman rakyat, mina padi (perikanan sawah) dan karamba masih sangat kurang. Hal tersebut lebih dikarenakan kurang tertariknya petani pada usaha budidaya perikanan. Sementara potensi perikanan laut di pantai selatan belum diupayakan secara maksimal.

2.1.2.7. Energi dan Sumber Daya Mineral

Di sektor Energi dan Sumber daya Mineral, Kabupaten Wonogiri memiliki potensi bahan tambang sebanyak 19 jenis. Bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi, dapat dieksploitasi dan cadangannya cukup besar sebanyak 14 jenis yaitu emas, tembaga, galena, seng, mangan, batu gamping, andesit, tras, sirtu, lempung, pasir kuarsa, klasit, batu mulia, dan batu pasir. Kontribusi pertambangan terhadap PDRB selama tahun 2000 – 2005 rata-rata hanya sebesar 0,77 % sehingga belum mampu mendukung perekonomian daerah. Jumlah pertambangan berijin sampai dengan tahun 2005 berjumlah 51 buah. Kemudian dari areal pertambangan yang sudah dimanfaatkan oleh

masyarakat belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestariannya. Walaupun reklamasi bekas pertambangan sudah dilakukan pada setiap tahunnya (seluas 2,8 ha pada tahun 2005).

Kabupaten Wonogiri dianugerahi potensi berupa kawasan karst, yang merupakan bagian dari karst Gunungsewu yang membentang dari Kabupaten Gunungkidul di sebelah barat sampai Kabupaten Pacitan disebelah timur. Luas kawasan karst di Kabupaten Wonogiri 338.74 Km² atau 18,6 % dari total wilayah, dengan penyebaran di Kecamatan Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito dan Giriwoyo. Kawasan karst menyimpan potensi yang sangat beragam, diantaranya potensi sumberdaya mineral, potensi sumber daya air, potensi sumber daya hayati dan potensi alam yang sangat indah. Pada saat ini potensi yang ada belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mengingat masih adanya kendala berupa keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dan kekawatiran berbenturan dengan kelestarian karts.

2.1.2.8. Perdagangan

Usaha jasa perdagangan di Kabupaten Wonogiri masih didominasi perdagangan produk primer hasil pertanian, sedangkan komoditi perdagangan yang berorientasi ekspor belum berkembang secara optimal, sehingga belum dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB. Selama tahun 2000 - 2005 rata-rata sumbangan sektor perdagangan sebesar 13,49 %. Selain itu belum berkembangnya usaha jasa perdagangan di Wonogiri karena masih belum memadainya sarana prasarana perdagangan khususnya pasar. Volume ekspor komoditas baik pertanian dan perkebunan serta hasil olahan kayu Kabupaten Wonogiri ke beberapa negara baik Asia, Australia, Eropa dan Amerika dengan nilai ekspor sebesar Rp. 110.816.380.000,-.

Namun demikian terjadi pertumbuhan sarana perdagangan lainnya yaitu toko swalayan dan meningkatnya jumlah usaha perdagangan, terbukti dengan peningkatan kepemilikan TDP dan SIUP yang pada tahun 2005 sebanyak 991 pengusaha pemilik TDP dan 991 pengusaha memiliki SIUP. Dari hasil ekspor non migas selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi nilai perdagangan, yang terendah tahun 2002 sebesar Rp. 31,190 Milyard dan tertinggi tahun 2000 sebesar Rp. 63,569 Milyard.

2.1.2.9. Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata daerah belum dilakukan pengembangan secara optimal, meskipun di Kabupaten Wonogiri memiliki obyek dan daya tarik wisata yang potensial. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penataan obyek wisata dan rendahnya tingkat aksesibilitas ke lokasi wisata. Demikian juga industri jasa pariwisata juga belum berkembang karena dari segi kuantitas masih sangat minim keberadaan usaha jasa penginapan dan jasa akomodasi serta secara kualitas masih terbatasnya sumberdaya manusia yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan. Wisatawan yang berkunjung ke Wonogiri adalah wisatawan nusantara dengan jumlah 255.330 orang pada tahun 2004 dan menurun menjadi 188.322 orang pada tahun 2005, dengan lama tinggal wisatawan rata-rata hanya 1 (satu) hari.

Jumlah Hotel di Kabupaten Wonogiri sebanyak 19 hotel terdiri dari hotel melati 1, melati 2 dan melati 3. Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Wonogiri sebanyak 40 buah, sebagian besar terletak di sekitar Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur.

2.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Kabupaten Wonogiri terkait erat dengan upaya peningkatan daya saing daerah dan dalam upaya mendorong tumbuhnya budaya inovasi di kalangan masyarakat. Wujud pembangunan IPTEK itu antara lain melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development = R&D) baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara langsung maupun oleh lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Perguruan Tinggi dengan membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dunia usaha.

Kegiatan penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Wonogiri oleh masing-masing lembaga tersebut diatas selain jumlahnya yang masih relative terbatas, masing-masing secara umum masih berjalan sendiri-sendiri sesuai kebutuhan sesaat yang dihadapi oleh masing-masing lembaga. Untuk itu diperlukan upaya sinergitas antar lembaga tersebut dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumberdaya IPTEK untuk kepentingan peningkatan produktivitas industri dan jasa di wilayah Kabupaten Wonogiri. Kelemahan yang

masih dirasakan saat ini adalah masih terbatasnya implementasi pemanfaatan teknologi bagi pengembangan industri dan jasa, sehingga mampu ikut serta mengangkat peran IPTEK dalam perekonomian daerah. Dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat dukungan Teknologi Tepat Guna (TTG) mutlak diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dan efisiensi produksi. Selama lima tahun terakhir bantuan alat-alat TTG telah disalurkan kepada kelompok masyarakat. Pengawasan bantuan TTG dilakukan oleh Warung Teknologi Desa (Wartekdes) di tingkat Desa/Kelurahan dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kecamatan.

2.1.4. Sarana dan Prasarana

2.1.4.1. Perhubungan

Permasalahan pembangunan sarana prasarana dalam bidang bina marga secara garis besar terlihat dari kondisi jalan dan jembatan Kabupaten, dimana jalan Kabupaten sepanjang 1.029,615 Km berdasarkan data tahun 2005 yang kondisinya baik hanya 584,22 km atau 56,74 %. Sedangkan sisanya sepanjang 385,09 atau 37,40 % berkategori sedang, 54,32 km atau 5,28 % berkategori rusak dan 6,00 km atau 0,58 % dengan kondisi rusak berat. Ditinjau dari ruas jalan, jembatan Kabupaten yang seluruhnya berjumlah 418 buah dengan panjang 3.485,97 m, sebagian besar yaitu sepanjang 3.137,37 m atau 90 % kondisinya cukup baik tetapi pada ruas – ruas jalan tertentu terdapat beberapa jembatan yang tidak memenuhi syarat karena sempit dan daya dukungnya terbatas. Di sisi lain, jalan desa sepanjang 1.035 Km berdasarkan data tahun 2005 yang kondisinya baik hanya 157,23 Km atau 15,19 %. Sehingga secara umum pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Wonogiri perlu ditingkatkan. Sementara itu mulai tahun 2006 perlu menyiapkan dukungan terhadap dimulainya pekerjaan fisik pembangunan jalan jalur lintas Selatan-Selatan yang melintasi Kecamatan Giriwoyo, Giritontro dan Pracimantoro.

Sarana prasana perhubungan terutama transportasi darat merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Wonogiri. Berdasarkan data tahun 2005, prosentase sumbangan sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB sebesar 10,79 % yaitu pada urutan keempat setelah sektor jasa-jasa. Hal ini didukung dengan kondisi rambu-rambu lalu lintas, trafict light dan flash light yang ada secara kualitas dalam kondisi baik semua (100%) walaupun secara

kuantitatif masih kurang mencukupi dimana saat ini baru mencapai 65 % dari kebutuhan. Demikian pula kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin menjamur di Wonogiri, namun sarana prasarana transportasi umum masih sangat kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2005, dari kebutuhan sebanyak 115 armada angkutan pedesaan, baru 85 armada yang tersedia, sedangkan dari kebutuhan sebanyak 815 armada angkutan pedesaan antar kota kecamatan maupun wilayah perbatasan, baru 602 armada yang tersedia. Dari sisi keadaan prasarana transportasi juga belum memadai, terbukti dari 24 terminal yang ada baru 6 terminal dengan kondisi baik. Di sisi lain terjadi peningkatan pada ketersediaan angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sejumlah 684 buah dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sejumlah 254 buah pada tahun 2004.

2.1.4.2. Perumahan dan Permukiman

Permasalahan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dari kualitas sarana permukiman yang tersedia. Luas kawasan permukiman di Wonogiri seluas 37.495 hektar, pada tahun 2005 dihuni oleh 255.955 KK. Dari jumlah KK tersebut, baru 180.360 KK atau 70,58 % yang berkategori memiliki/mendiami rumah sehat dan sejumlah 8.487 KK atau 3,3 % belum teraliri jaringan listrik yang mencakup 250 Dusun/Lingkungan atau 10,73 % dari 2.329 Dusun/Lingkungan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Di sisi lain pada tahun 2004 terjadi pembangunan rumah baru sebanyak 82.852 rumah atau 4,76 % dari jumlah rumah se-kabupaten Wonogiri. Sehingga dalam rangka mewujudkan permukiman sehat bagi masyarakat di Wonogiri masih perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan secara lintas sektor.

Selain sarana prasarana permukiman, infrastruktur perkotaan lainnya juga masih perlu dikembangkan dalam rangka menunjang citra kota di wilayah Kabupaten Wonogiri. Pembangunan bidang kebersihan dan pertamanan saat ini masih belum dapat mewujudkan Kota-Kota di Wonogiri menjadi kota yang bersih, sehat dan nyaman sebagai tempat tinggal, tempat rekreasi, pusat kegiatan ekonomi serta pusat pemerintahan dan perkantoran yang memadai seperti drainase, sanitasi, tempat pembuangan sampah, taman-taman dan lain-lain. Dari data tahun 2001 - 2005, pembangunan taman perkotaan dan sarana olahraga tidak mengalami peningkatan. Dari taman perkotaan seluas 17.000 m² yang terpelihara pada tahun 2005 seluas 16.700 m² dan sarana

olah raga yang terpelihara sejumlah 5 buah. Sedangkan lampu penerangan jalan yang ada sejumlah 1.560 buah pada tahun 2005 dengan kondisi 100 % baik.

2.1.4.3. Sumberdaya Air

Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Wonogiri terdiri dari CAT Sragen – Karanganyar dengan potensi air tanah tidak tertekan sebesar 1.338 juta m³/ tahun dan tertekan sebesar 21 juta m³/ tahun, CAT Ngawi – Ponorogo dengan potensi air tanah tidak tertekan sebesar 1.547 juta m³/ tahun dan tertekan sebesar 66 juta m³/ tahun, CAT Wonosari dengan potensi air tanah tidak tertekan sebesar 467 m³/ tahun dan CAT Eromoko dengan potensi air tanah tidak tertekan sebesar 10 m³/ tahun.

Sebagai daerah pegunungan yang berkapur, terutama dibagian selatan, Kabupaten Wonogiri praktis merupakan daerah kekeringan. Permasalahan kekeringan atau kecukupan air bersih merupakan permasalahan yang terjadi setiap tahun. Kabupaten Wonogiri setiap tahun dilanda kekeringan khususnya kekurangan air bersih meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 77 desa/kelurahan. Sementara itu sampai dengan tahun 2005, kekeringan terjadi di wilayah Wonogiri bagian selatan yaitu Kecamatan Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito dan Giriwoyo melanda 30 desa, 148 dusun yang dihuni sekitar 14.863 KK atau 35,5 % dari total KK di 5 Kecamatan tersebut. Dari 89.589 jiwa jumlah penduduk rawan air bersih di musim kemarau, yang tercukupi air bersih tahun 2005 sebesar 68.653 jiwa atau 76,62 %. Sedangkan cakupan rumah yang terlayani PDAM hanya 17.701 rumah.

2.1.4.4. Telekomunikasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan sarana prasarana telekomunikasi konvensional semakin mengalami penurunan. Pemanfaatan telekomunikasi dengan teknologi maju seperti internet ikut mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, apalagi ditunjang dengan pengetahuan masyarakat akan manfaat internet itu yang semakin maju dan meluas.

Teknologi komunikasi saat ini juga semakin berkembang dan mudah dijangkau oleh masyarakat, salah satu diantaranya adalah teknologi handphone (HP). Persaingan perusahaan jasa komunikasi ini

semakin ketat seiring dengan pemakaian teknologi yang semakin berkembang, sehingga hal itu secara tidak langsung juga menguntungkan kepada masyarakat pengguna handphone terutama dari segi harga maupun fasilitas yang semakin lengkap dan canggih.

Namun demikian selain dampak positif kemajuan sarana prasarana telekomunikasi, juga harus diwaspadai dampak negatif arus deras komunikasi kepada masyarakat. Tayangan acara yang semakin kompleks dan bebas melalui saluran-saluran sarana hiburan semakin sulit untuk dibatasi aksesnya untuk kalangan generasi muda, sehingga hal itu seringkali menimbulkan dampak negatif dalam segi moral dan perilaku generasi muda.

2.1.4.5. Energi

Perkembangan distribusi energi perlistrikan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan kondisi yang semakin baik. Jangkauan pelayanan energi listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin meluas, hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah pelanggan dan penggunaan tenaga listrik bagi kehidupan rumah tangga maupun industri masyarakat. Pendayagunaan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Wonogiri ini didukung oleh keberadaan Waduk Serbaguna Gajah Mungkur yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar yaitu mencapai 730 juta m³ yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik dengan kapasitas 12,4 Mega Watt. Meskipun demikian karena luasnya wilayah Kabupaten Wonogiri maka distribusi tenaga listrik ini masih belum dapat menjangkau semua kebutuhan masyarakat akan energi listrik.

Kebutuhan energi bahan bakar bagi masyarakat cukup besar dan strategis seiring dengan perkembangan kegiatan sektor perhubungan dan transportasi di Kabupaten Wonogiri. Selama ini penyediaan sumber energy bahan bakar itu dilakukan oleh SPBU, Agen Minyak Tanah dan Agen LPG, yang sampai saat ini masih menghadapi permasalahan ketersediaan dan distribusi yang belum merata, sehingga sering menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan bahan bakar bagi masyarakat.

2.1.4.6. Sarana Perekonomian

Infrastruktur perekonomian di Kabupaten Wonogiri salah satunya ditunjukkan dengan terbatasnya jumlah pasar pada tahun 2005 yang hanya 94 buah (dari 26 pasar umum yang berkondisi baik 23 buah dan dari 68 pasar desa yang berkondisi baik hanya 31 buah) atau dengan rasio rata-rata 1 (satu) pasar untuk 11.930 penduduk. Jika dilihat dari kondisi pasar yang dimiliki Pemerintah Daerah, dari 26 buah dengan kios 2471 unit dan los sebanyak 962 unit, kondisinya yang cukup baik hanya 11 pasar, sedangkan 15 pasar perlu perbaikan (revitalisasi). Selain itu guna menghadapi perkembangan perekonomian di kawasan Pawonsari maka perlu perhatian untuk meningkatkan pengembangan pasar-pasar di wilayah tersebut baik pasar distrik, pasar kecamatan maupun pasar desa yang berpotensi.

2.1.4.7. Pengairan

Permasalahan pembangunan sarana prasarana irigasi dapat ditinjau dari jenis sarana irigasi yang digunakan dan kondisi bangunan sarana irigasi. Dari jenis sarana irigasi berdasarkan data tahun 2005 diketahui bahwa untuk mengairi lahan persawahan seluas 31.417 hektar di Kabupaten Wonogiri yang menggunakan irigasi teknis hanya 7.454 hektar atau 23,72 %, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis seluas 4.459 hektar atau 14,19 %, irigasi sederhana 8.758 hektar atau 27,88 %, tadah hujan 8.140 hektar atau 25,91 %, dan sisanya seluas 2.606 hektar atau 8,3 % menggunakan irigasi lainnya. Selanjutnya ditinjau dari kondisi sarana irigasi sebagian besar merupakan bangunan lama, banyak yang telah rusak sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal.

Dari data tahun 2005 dengan jumlah bendung sebanyak 431 buah maka yang berkondisi baik hanya 263 buah atau 61,20 %. Hal ini didukung dengan kondisi saluran irigasi sepanjang 1.589,67 Km maka yang berkondisi baik hanya 941,08 km atau 59,20 %. Berdasarkan permasalahan tersebut, secara umum dapat dikatakan ketersediaan sarana irigasi di Wonogiri masih kurang memadai. Keberadaan Waduk Serbaguna Gajah Mungkur memiliki potensi Sumber daya air yang besar (730 juta m³) dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik (12,4 Mega Watt). Sedangkan pemanfaatan air Waduk sebagai air irigasi seluas 23.200 ha banyak dinikmati oleh Kabupaten lain, yaitu Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen.

2.1.5. Politik dan Tata Pemerintahan

Pembangunan politik di wilayah Kabupaten Wonogiri masih perlu peningkatan secara demokratis. Walaupun dari segi partisipasi politik masyarakatnya termasuk cukup tinggi dan dinamis. Namun demikian budaya politik masyarakat belum berkembang secara memadai yang ditandai dengan masih kurangnya pemahaman rakyat terhadap hak dan kewajiban, adanya distorsi atas aspirasi demi kepentingan tertentu dan masih adanya pemaksaan kehendak dalam kehidupan politik baik dari elit politik, penyelenggara pemerintahan maupun kelompok-kelompok kepentingan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan itu adanya perubahan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, sehingga dapat memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dari aspek kelembagaan, pemerintah Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada tantangan untuk membentuk lembaga birokrasi yang mampu menampung dan menyelenggarakan semua urusan yang menjadi kewenangan daerah serta mampu menangani permasalahan dan mengembangkan segenap potensi daerah. Sementara itu lembaga tersebut diharapkan yang miskin struktur dan kaya fungsi, sekaligus juga efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu, desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, koordinasi dan beban kerja. Dari aspek ketatalaksanaan, dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang murah, mudah, cepat, sederhana, transparan, terjangkau dan memiliki kepastian hukum. Tetapi saat ini masih ditemui keluhan masyarakat tentang belum terselenggaranya pelayanan prima dan pelayanan terpadu. Oleh karena itu perlu diadakan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan, melalui pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah.

Dari aspek keuangan daerah, sumber Pendapatan Daerah khususnya penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah masih bertumpu pada intensifikasi dan

ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, belum mengarah pada penumbuhan investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang pada akhirnya akan dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Pemerintahan Desa dalam otonomi daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan terendah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan pemerintahan Desa masih terkendala antara lain dengan lemahnya kualitas SDM serta kurangnya kesejahteraan aparatnya. Kebijakan pemberian Dana Alokasi kepada Desa (termasuk Kelurahan) terhadap seluruh Desa/Kelurahan yang ada yaitu sejumlah 294 Desa/Kelurahan telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi pada implementasinya belum optimal yang dikarenakan masih lemahnya tertib administrasi serta kurang berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di Desa secara baik.

Aspek pemerintahan umum lainnya yaitu dalam kehidupan berdemokrasi masih ditemui kurangnya keberdayaan masyarakat khususnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan belum disediakannya ruang publik yang dapat memberikan akses dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta sarana-sarana sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan lancar.

2.1.6. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri masih dihadapkan pada upaya memelihara, mempertahankan dan meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini berupa melemahnya rasa persatuan dan toleransi sosial masyarakat sehingga berpotensi terjadinya konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang justru bukan bersifat SARA. Pada pihak lain ancaman terorisme masih menghantui kehidupan masyarakat yang berdampak bukan saja pada kurangnya rasa aman dan tenteram, tetapi juga pada kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu sebagai daerah bertopografi bergunung-gunung dihadapkan pada ancaman terjadinya bencana alam,

terutama banjir dan tanah longsor serta angin topan. Hal ini memerlukan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat.

2.1.7. Hukum dan Aparatur

2.1.7.1. Hukum

Pembangunan bidang hukum dan Hak Azasi Manusia di wilayah Kabupaten Wonogiri masih dihadapkan permasalahan dalam aspek jaminan kepastian hukum dalam rangka ketertiban masyarakat, yaitu masih diperlukan upaya peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan (*law inforcement*) terutama pelaksanaan Peraturan Daerah. Belum tersedianya PPNS yang berwenang menyidik pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran PNS menjadi salah satu kendala utama. Disisi lain pemahaman dan kesadaran masyarakat serta para penegak hukum masih perlu peningkatan.

2.1.7.2. Aparatur

Pembangunan bidang aparatur daerah di Kabupaten masih dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Wonogiri adalah 12.677 pegawai. Ditinjau dari pendidikan formal terakhir pegawai pada akhir tahun 2005, sebagian besar pegawai yaitu 39,69 % dari jumlah pegawai yang ada atau sebanyak 5.031 pegawai berpendidikan setingkat SLTA, SLTP, dan SD. Sedangkan yang berpendidikan Diploma atau Sarjana muda, Sarjana (S-1) dan Pasca Sarjana (S-2) masing-masing sebesar 32,11 % (4.071 pegawai), 26,11 % (3.437 pegawai) dan 1,09 % (138 pegawai). Selain pendidikan formal, keikutsertaan pegawai dalam diklat baik teknis maupun fungsional sebesar 30,83 % atau sebanyak 3.908 pegawai. Sedangkan keikutsertaan pegawai dalam Diklat Kepemimpinan sebesar 96,78 % atau 722 pejabat dari 746 pejabat struktural yang ada. Permasalahan lain di bidang kepegawaian menyangkut tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil ada kecenderungan menurun diindikasikan dengan semakin banyaknya pelanggaran disiplin dan penyimpangan dalam tugas. Selain itu keterbatasan kemampuan daerah menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur yang signifikan. Sebaran dan distribusi pegawai belum dapat dipenuhi disebabkan terbatasnya rekrutmen pegawai baru yang tidak sebanding dengan jumlah yang memasuki usia pensiun. Tuntutan profesionalisme aparatur

membutuhkan standar kompetensi jabatan dan alur pola karir pegawai sehingga terdapat kepastian karir Pegawai Negeri Sipil sesuai kompetensi yang dimilikinya.

2.1.8. Wilayah Tata Ruang dan Pertanahan

2.1.8.1. Wilayah

Wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri terbagi atas 25 Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari ibukota kabupaten sejauh 68 km, kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Selogiri. Kecamatan Puhpelem yang memiliki luas wilayah 3.162 ha merupakan kecamatan yang tersempit wilayahnya, sedangkan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pracimantoro dengan luas wilayah 14.214,3 ha. Sementara Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya yang berada pada ketinggian ± 600 m di atas permukaan air laut dan yang paling rendah adalah Kecamatan Selogiri yang berada pada ketinggian 106 m di atas permukaan air laut.

Wilayah Kabupaten Wonogiri sebagian besar berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo bagian hulu dan terdapat Waduk Serbaguna Gajah Mungkur yang kondisinya semakin mengkuatirkan dan sesuai dengan penataan ruang 30 % harus berupa kawasan yang berfungsi sebagai hutan.

Topografi wilayah Kabupaten Wonogiri sebagian besar berupa tanah berbukit berupa pegunungan kapur dengan kemiringannya rata-rata 30°, yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu. Terdapat 9 (sembilan) Sub DAS yaitu (1) Sub DAS Keduang; (2) Sub DAS Bulu dan Temon; (3) Sub DAS Kalialang; (4) Sub DAS Wiroko; (5) Sub DAS Kali Wuryantoro; (6) Sub DAS Ngunggahan; (7) Sub DAS (Kresek); (8) Sub DAS Oya dan (9) Sub DAS Walikan.

2.1.8.2. Tata Ruang

Pembangunan penataan ruang wilayah masih menghadapi permasalahan bahwa belum seluruh wilayah Wonogiri memiliki rencana tata ruang. Dari 25 Kota Kecamatan pada tahun 2005 yang memiliki Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan atau RUTRK baru 14 Kota

Kecamatan. Sehingga mengakibatkan pembangunan belum terencana, tertata dan terkendali sesuai dengan peruntukannya. Selain itu kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya tata ruang masih kurang. Terbukti masih sedikit jumlah pemohon IMB tiap tahunnya jika dibanding dengan pertambahan jumlah pembangunan rumah. Tahun 2004 hanya ada 396 pemohon IMB dari 82.852 rumah baru yang dibangun.

2.1.8.3. Pertanahan

Luas wilayah Kabupaten Wonogiri 182.236,0236 hektar terbagi menjadi 739.892 bidang. Berdasarkan data tahun 2005 tanah yang telah bersertifikat sejumlah 518.903 bidang atau 70,13 %, sehingga tanah yang belum bersertifikat adalah sejumlah 220.989 bidang atau 29,87 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah sudah tinggi. Namun masih perlu peningkatan pelayanan terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah akan jaminan hukum atas hak kepemilikan lahan.

Berdasarkan tata guna lahan dari luas Kabupaten Wonogiri diatas dimanfaatkan untuk tegalan sebesar yaitu 64.042 ha (35,14 %), 37.495 ha (20,57 %) untuk bangunan/pekarangan, 31.109 ha (17,07 %) untuk sawah, 10.183 ha (5,59 %) untuk hutan rakyat, 15,124 ha (8,30 %) untuk Hutan Negara dan 24.283 ha (13,33 %) digunakan untuk lainnya.

2.1.9. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tahun 2005 masih terdapat lahan kritis yang relatif luas yaitu 17.379 hektar atau 9,54 % dari luas wilayah keseluruhan. Akibatnya mengurangi daya dukung kelestarian sumber daya hayati. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tingkat erosi yang cukup tinggi di Wonogiri, sehingga mengancam kelestarian waduk Gajah Mungkur, karena mengalami pendangkalan yang serius dengan rata-rata selama tahun 2000 - 2005 adalah 4 mm per tahun. Sedangkan design awal diprediksikan sedimentasi pada waduk Gajah Mungkur rata-rata 1,5 mm per tahun.

II. 2. TANTANGAN

2.2.1. FISIK

Tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri secara fisik berkaitan dengan adanya keterbatasan fisik alamiah, seperti karakter alam yang merupakan bawaan dari wilayah, dimana keterbatasan ini dapat bersifat mutlak (limitasi), ataupun dapat pula sebatas menghambat. Tantangan fisik pembangunan Kabupaten Wonogiri itu adalah:

1. Konversi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan permintaan pengalih-fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Perubahan dimaksud meliputi pengurangan penggunaan tanah sawah dan meningkatnya penggunaan lahan untuk perumahan, pekarangan dan tegalan, serta untuk kegiatan ekonomi.
2. Masih terdapat lahan kritis yang relatif luas sehingga berakibat mengurangi daya dukung kelestarian sumber daya hayati. Selain itu sebagai daerah pegunungan yang berkapur, terutama dibagian selatan, Kabupaten Wonogiri praktis merupakan daerah yang sering dilanda kekeringan bahkan permasalahan kekeringan atau kecukupan air bersih merupakan permasalahan yang terjadi hampir setiap tahun. Kondisi lahan seperti diatas menjadikan Kabupaten Wonogiri sebagai wilayah yang rawan terhadap beberapa bencana alam seperti tanah longsor dan bencana kekeringan lahan.
3. Posisi Kabupaten Wonogiri yang berada pada kawasan Pegunungan Seribu, bagian selatan Jawa Tengah sebelah timur yang berada pada wilayah yang sebagian besar bukit dan pegunungan. Dampak posisi seperti ini menjadikan Kabupaten Wonogiri memiliki keterkaitan rendah dengan wilayah eksternal yang kurang kondusif bagi pengembangan wilayah.
4. Lahan di wilayah Kabupaten Wonogiri telah terdegradasi sehingga menurun secara kualitas. Selain itu usaha tani dataran tinggi yang dilakukan tanpa perlakuan konservasi, erosi yang banyak ditemukan mengindikasikan pada penurunan kualitas tanah secara kasat mata.
5. Luas kawasan hutan di Kabupaten Wonogiri masih perlu disesuaikan dengan standar minimal yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan tentang penataan ruang yang

berlaku. Selain luasan yang belum memadai, permasalahan produktifitas hasil hutan yang ada masih relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya budidaya hutan, disamping masih seringnya terjadi kasus perusakan hutan dengan adanya penebangan liar dan *illegal-logging*.

6. Pemanasan global (*global warming*) telah berpengaruh terhadap perubahan iklim yaitu musim hujan semakin pendek dan musim kemarau semakin panjang, sehingga situasi hal itu dapat berdampak buruk bagi Kabupaten Wonogiri yang telah mengalami defisit air.

2.2.2. SOSIAL BUDAYA

Tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri dalam aspek sosial budaya berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun distribusinya dan keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan.

1. Tingkat pendidikan formal penduduk di Kabupaten Wonogiri mayoritas masih pendidikan dasar. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah akan berdampak pada kemampuan dan ketrampilan yang relative rendah dalam rangka pengembangan daya saing daerah.
2. Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi pada kawasan-kawasan dengan daya dukung lingkungan yang terbatas, dimana laju pertumbuhan penduduknya melebihi laju pertumbuhan Kabupaten Wonogiri secara umum.
3. Tingkat kuantitas pelayanan pemerintah masih relatif rendah karena rendahnya rasio jumlah pegawai negeri terhadap jumlah penduduk rata-rata.
4. Tingkat kualitas pelayanan pemerintah masih relatif rendah yang ditunjukkan oleh etos kerja yang masih rendah dan belum tersedianya SPM di hampir sebagian besar SKPD.
5. Secara sosial kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan berdampak pada masuknya budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian budaya lokal dan memberikan dampak buruk pada perubahan perilaku dan hubungan sosial.

6. Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan di masa yang akan datang adalah upaya menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.
7. Pemenuhan hak-hak dasar dan upaya pengentasan kemiskinan merupakan tantangan yang sangat penting untuk dipecahkan karena semakin meningkatnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
8. Perhatian terhadap adanya indikasi penurunan nilai moral, budaya dan agama sebagai akibat dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, serta eksistensi dari adanya ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi, merupakan tantangan bidang sosial budaya yang mendesak untuk diatasi.

2.2.3. EKONOMI

Tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri dalam aspek ekonomi berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun distribusinya dan keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan.

1. Masih rendahnya tingkat ketrampilan penduduk untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian dan masih terbatasnya kemampuan penduduk untuk mengadopsi teknologi bagi peningkatan produktivitas pertanian maupun pengembangan bidang industri dan jasa.
2. Kondisi kesempatan kerja yang bertumpu pada sektor pertanian yang cenderung memberikan tingkat pendapatan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan ketimpangan peranan sektor pertanian terhadap ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja yang mengisyaratkan rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima petani.
3. Sempitnya kepemilikan lahan petani, dimana rendahnya kepemilikan lahan pertanian ini berdampak pada rendahnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.

5. Daya tawar petani dalam tata niaga produk pertanian yang cenderung masih rendah. Daya tawar petani yang rendah itu antara lain karena melimpahnya produksi yang dihasilkan dan keinginan petani untuk mendapatkan uang kontan secara cepat.
6. Angka pengangguran terbuka yang semakin meningkat karena peningkatan jumlah penduduk disertai dengan semakin sempitnya lahan pertanian serta kurang berkembangnya kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian serta ketrampilan penduduk yang cenderung rendah.
7. Kegiatan agroindustrial produk masih terbatas sehingga produk pertanian yang dijual masih dalam bentuk produk primer dengan nilai tambah yang cenderung masih rendah. Industri pengolahan hasil pertanian dengan ragam produk yang terbatas akan menyebabkan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan
8. Kedekatan fisik wilayah sebagai satu kesatuan ekosistem akan berdampak pada kesamaan produk yang dihasilkan, sehingga walaupun produksi melimpah produsen daerah dihadapkan pada banyaknya kompetitor sehingga menyebabkan harga jual yang diterima petani sangat tergantung oleh pedagang.
9. Masih rendahnya tingkat penanaman modal/ investasi yang antara lain disebabkan kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif untuk pengembangan investasi yang ditandai dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Wonogiri.
10. Globalisasi akan membawa tantangan pada peningkatan daya saing ekonomi wilayah, karena globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk yang dihasilkan karena meningkatnya jumlah kompetitor tidak hanya dari wilayah domestik tetapi juga dari negara lain.
11. Krisis finansial yang melanda perekonomian secara nasional secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri melalui indikasi berkurangnya peluang pasar ekspor dan menurunnya investasi daerah karena tingginya tingkat bunga.

2.2.4. TATA RUANG WILAYAH, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri dalam aspek tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkaitan dengan adanya peningkatan dinamika dan aktivitas penduduk disatu sisi dan kegiatan eksplotitasi sumber daya alam yang memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

1. Pada masa yang akan datang ruang menjadi komoditi yang strategis sehingga pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
2. Kebutuhan akan lahan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, sehingga tantangan yang dihadapi ke depan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang telah mulai dirintis saat ini melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.
3. Pengelolaan potensi sumberdaya alam perlu dilakukan dengan pola kerjasama kemitraan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha sehingga terjadi optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah tanpa meninggalkan upaya-upaya pelestarian dan konservasi lingkungan hidup.
4. Eksploitasi sumberdaya mineral dan kegiatan penambangan yang mengancam kerusakan dan penurunan kualitas sumberdaya dan lingkungan perlu diwaspadai dengan pengaturan dan implementasi upaya pengamanan dan penertiban di lapangan.
5. Tuntutan kebutuhan kawawan hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku perlu mendapatkan perhatian dengan usaha pengembangan hutan rakyat yang sekaligus melakukan penataan terhadap pemanfaatan hutan yang produktif dan lestari.

2.2.5. POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri dalam aspek politik, hukum dan pemerintahan berkaitan dengan semakin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi, perubahan geopolitik nasional dan internasional, serta upaya penegakan hukum

secara adil dan tidak diskrimatif yang menjadi tuntutan mendesak masyarakat.

1. Tantangan bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih nyata, transparan dan bertanggungjawab.
2. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang prima dengan berbasis partisipasi masyarakat semakin mendesak seiring dengan perubahan paradigma bahwa aparatus pemerintah daerah merupakan pelayan bagi masyarakat.
3. Tata pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa yang partisipatif semakin dibutuhkan karena sebagai ujung tombak upaya mensejahterakan masyarakat, desa harus semakin maju dan berkembang.
4. Tantangan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tuntutan untuk mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan sosial budaya yang kondusif.
5. Upaya peningkatan jaminan atas kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum merupakan tantangan bidang hukum ke depan yang perlu dipersiapkan.
6. Dalam hal aparatur pemerintahan, tantangan ke depan adalah upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan memiliki kualitas prima sehingga dapat mendukung semakin cepatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.2.6. SARANA PRASARANA WILAYAH

Tantangan pembangunan Kabupaten Wonogiri dalam aspek sarana prasarana wilayah berkaitan dengan adanya keterbatasan kelembagaan daerah, baik menyangkut kapasitas kelembagaan maupun kedudukan kelembagaan dan keterbatasan sumber pembiayaan

pembangunan baik sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang konvensional maupun non konvensional.

1. Masih terdapat prasarana perhubungan seperti jalan Kabupaten yang dalam kondisi rusak dan rusak berat serta pada ruas-ruas jalan tertentu terdapat jembatan yang tidak memenuhi syarat karena sempit dan daya dukungnya terbatas. Sedangkan prasarana jalan desa yang dalam kondisi baik masih relative sedikit jika dibandingkan dengan total jalan desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
2. Sarana transportasi umum untuk menjangkau desa-desa masih kurang memadai seperti armada angkutan pedesaan. Demikian pula prasarana transportasi seperti terminal angkutan dalam kondisi baik juga belum memadai.
3. Sarana irigasi sebagian besar merupakan bangunan lama, banyak yang telah rusak sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal, maka secara umum tantangan yang dihadapi ke depan adalah ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana irigasi di Kabupaten Wonogiri dalam rangka optimalisasi potensi Pertanian dalam arti luas.
4. Kualitas sarana prasarana untuk pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih kurang memadai untuk mencapai ketercukupan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk memenuhi standar baku pelayanan maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. 3. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional yang secara riil maupun potensial dimiliki dan dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri yang berada pada jalur lalu lintas Jawa bagian selatan menghubungkan kota-kota di Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, dll) dan Yogyakarta menjadikan wilayah ini tidak lagi berada di ujung pinggir wilayah Provinsi Jawa Tengah, namun berada pada wilayah yang strategis sebagai perantara kedua wilayah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi dengan adanya

pembangunan jalan jalur selatan Pacitan – Wonogiri – Wonosari (DIY), maka akan terjadi perubahan pola sirkulasi dan aksesibilitas wilayah sehingga menjadikan potensi Kabupaten Wonogiri semakin berkembang.

2. Penduduk Kabupaten Wonogiri dengan berbagai corak keragaman dalam perilaku, karakteristik sosial budaya dan ekonomi merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat menjadi modal dasar pembangunan jika kecerdasan, kemampuan dan ketrampilan dalam penguasaan IPTEK serta aspek kualitas dan daya saing yang lain senantiasa dikembangkan.
3. Keragaman budaya Kabupaten Wonogiri yang mengandung sistem nilai, norma, dan budi pekerti yang luhur dapat menjadi modal dasar yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis jati diri budaya dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
4. Pemberian otonomi kepada daerah sebagai salah satu wujud tuntutan reformasi, memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengoptimalkan sumberdaya daerah baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam maupun sumberdana dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
5. Kondisi alam pegunungan dengan panorama yang indah dan kekayaan sumberdaya alam, menjadi modal dasar pembangunan daerah yang dapat mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah di bidang pertanian, agrobisnis, pariwisata, perdagangan dan industri kerajinan sebagai tumpuan sistem ekonomi kerakyatan Kabupaten Wonogiri.